PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

LAPORAN TAHUNAN



2025

BPR
BANK PERKREDITAN RAKYAT

LPS
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

PT.BPR Depo Mitra Mandiri
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
serta merupakan peserta penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1. Pengantar

Kondisi perekonomian tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan IV-2025 tumbuh stabil sebesar 5,39 persen (y-on-y). Pulau Jawa tetap menjadi mesin utama pertumbuhan dengan kontribusi mencapai 56,68 persen terhadap PDB nasional, didorong oleh aktivitas produksi dan konsumsi yang solid. Pertumbuhan tahunan 2025 secara keseluruhan (c-to-c) mencapai 5,11 persen.

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbinganNya, sehingga kegiatan operasional BPR Depo Mitra Mandiri pada tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham serta Dewan Komisaris yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk, sehingga kegiatan operasional BPR Depo Mitra Mandiri dapat berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.

Sebagai gambaran lengkap atas pencapaian kegiatan usaha tahun 2025 dengan ini disampaikan laporan kegiatan perseroan yang meliputi antara lain informasi umum, laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 serta catatan atas laporan keuangan.

Semoga laporan ini dapat diterima dengan baik dan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan BPR Depo Mitra Mandiri.

1. Data Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris:

i. Komisaris Utama

Fasika Khaerul Zaman berdomisili di Jakarta Selatan, dengan pendidikan terakhir S2 di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009 serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Komisaris yang akan berakhir pada 20 Desember 2026.

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-191/KR.02/2021 tanggal 07 Desember 2021 dengan Jabatan sebagai Komisaris Utama serta Akta Notaris Yatini Nomor : 03 Tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0277248 dimana periode masa jabatan 31 Maret 2025 sd 31 Maret 2028.

ii. Komisaris

Irianto berdomisili di Depok, dengan pendidikan terakhir S2 di Monash University pada tahun 1993 serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Komisaris yang akan berakhir pada 07 Juli 2028.

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-87/KR.02/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan Jabatan sebagai Komisaris serta Akta Notaris Yatini Nomor : 03 Tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0277248 dimana periode masa jabatan 31 Maret 2025 sd 31 Maret 2028.

b. Direksi

i. Direktur Utama

Teti Ofianti berdomisili di Depok, dengan pendidikan terakhir S2 di Universitas Ekuitas pada tahun 2026 serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direktur yang akan berakhir pada 30 Desember 2027.

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-54/KR.021/2023 tanggal 15 November 2023 dengan Jabatan sebagai Direktur Utama serta Akta Notaris Yatini Nomor : 03 Tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0277248 dimana periode masa jabatan 31 Maret 2025 sd 31 Maret 2028.

ii. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Meulya Putri berdomisili di Bogor, dengan pendidikan terakhir S1 di STIE Manajemen Bisnis Indonesia pada tahun 2016 serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direktur yang akan berakhir pada 25 Oktober 2026.

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-7/KO.12/2023 tanggal 15 November 2023 dengan Jabatan sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta Akta Notaris Yatini Nomor : 03 Tanggal 13 November 2024 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0277248 dimana periode masa jabatan 31 Maret 2025 sd 31 Maret 2028.

2. Data Pejabat Eksekutif

a. Kepala Marketing

Wiji Sutiawan berdomisili di Tangerang Selatan mulai menjabat pada tanggal 02 Mei 2023 berdasarkan surat pengangkatan nomor 020/SK-PSN/0523 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 029/OJK-DEPO/0523

b. PE Audit Internal

Hadidjah berdomisili di Jakarta Timur mulai menjabat pada tanggal 05 Juli 2023 berdasarkan surat pengangkatan nomor 047/SK-PSN/0723 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 047/OJK-DEPO/0723

c. PE Manajemen Resiko, Kepatuhan dan APU PPT

Kristia Ranggaini berdomisili di Tangerang Selatan mulai menjabat pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat pengangkatan nomor 055/SK-PSN/0823 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 055/OJK-DEPO/0823

d. PE Teknologi Informasi

Rizky Ardiansyah berdomisili di Depok mulai menjabat pada tanggal 05 Maret 2024 berdasarkan surat pengangkatan nomor 013/SK-PSN/0324 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 019/OJK-DEPO/0324

e. PE SDM dan Umum

Faisal Hawary berdomisili di Depok mulai menjabat pada tanggal 05 Maret 2024 berdasarkan surat pengangkatan nomor 015/SK-PSN/0324 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 020/OJK-DEPO/0324

f. Kepala Cabang Cibinong

Eliya berdomisili di Cibinong mulai menjabat pada tanggal 09 Mei 2022 berdasarkan surat pengangkatan nomor 027/SK-PSN/0522 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 027/OJK-DEPO/0522

g. Kepala Cabang Depok

Deni Karya Pamuji berdomisili di Depok mulai menjabat pada tanggal 08 Mei 2023 berdasarkan surat pengangkatan nomor 031/SK-PSN/0523 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 031/OJK-DEPO/0523

h. Kepala Penunjang Operasional

Fitra Setyadwi Utami berdomisili di Depok mulai menjabat pada tanggal 29 Desember 2025 berdasarkan surat pengangkatan nomor 033/SK-PSN/1225 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 054/OJK-DEPO/1225.

3. Data Kepemilikan Saham

Tahun 2025 terdapat penambahan modal disetor sesuai Akta Notaris Yatini, S.H, M.Kn. No. 09 Tanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0049814. Sehingga komposisi kepemilikan saham pada tahun 2025 sebagai berikut :

NO	NAMA	SAHAM (LEMBAR)	NOMINAL SAHAM	PROSENTASE
1.	PT. Hajar Aswad Tani Indonesia	8,078	8,078,000,000	95%
2.	Fasika Khaerul Zaman	424	424,000,000	5%
	Total	8,502	8,502,000,000	100%

4. Riwayat Pendirian BPR

PT. BPR Depo Mitra Mandiri selanjutnya disebut “Bank” adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 29 Maret 2005 berdasarkan akta Notaris Titiek Soebekti, SH No. 2 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

C-13263 HT.01.01.TH.2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55 tanggal 12 Juli 2005 Tambahan No. 7261.

Pada tahun 2008 telah dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dengan akta Notaris Titiek Soebekti No. 07 tanggal 12 Juni 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-47454.AH.01.02 tahun 2008 Tanggal 04 Agustus 2008 dan telah dilaporkan pula ke Bank Indonesia dengan surat No. 031/DEPO/BI/0808 tanggal 27 Agustus 2008.

Bank telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai Izin usaha BPR No.7/39/KEP.GBI/2005 tanggal 11 Juli 2005 dengan lokasi kantor Pusat di Jl. Margonda Raya No.23 B-2 Depok Jawa Barat. Namun sesuai dengan akta Notaris Isa Meilia, S.H, M.Kn No. 543 tanggal 26 Mei 2023 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 0032376-AH.01.02 TAHUN 2023 lokasi Kantor Pusat berpindah alamat di Ruko Cibubur Times Square Jalan Transyogi Rt 001 Rw 010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan pada Akta Notaris No.543 Tanggal 26 Mei 2023 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan No. AHU-0032376.AH.01.02. Tahun 2023 Bank DMM telah melakukan perubahan nomenklatur (tata nama) BPR sebagai berikut:

Semula : PT. BPR Perkreditan Rakyat Depo Mitra Mandiri
Menjadi : PT. BPR Perekonomian Rakyat Depo Mitra Mandiri

Profil

Nama Lengkap BPR	: PT. BPR Depo Mitra Mandiri
Nama Panggilan	: Bank DMM
Alamat Kantor	: Ruko Cibubur Times Square Jl Transyogi Rt 001 Rw 010, Kel Jatikarya, Kec Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.
Telepon	: (021) 22817575
Tanggal Berdiri	: 29 Maret 2005
Jenis Usaha	: Perbankan
Status	: Perseroan Terbatas
Website	: bprdepomitramandiri.co.id
Email	: bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id
Instagram	: bank_dmm
Modal Inti	: 12.534.160.717,-

Jumlah Jaringan : 3 Kantor Cabang

Dimana Laporan Keuangan tahun 2025 telah diaudit dengan Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti dengan Nama Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih, Ak, CA, CPA adapun opini akuntan publik Wajar Dengan Pengecualian.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tahun 2025

i. Asset

Posisi total asset per 31 Desember 2025 tercapai sebesar Rp. 116.930.716.122,- dan mencapai 108.01% dari realisasi tahun 2024 dengan komposisi dari Penempatan Pada Bank Lain mencapai Rp. 30.756.156.203,- dan Kredit Yang Diberikan (setelah dikurangi provisi dan ditambahkan biaya transaksi) mencapai Rp. 81.966.148.287,-

ii. Kredit yang diberikan

Posisi kredit yang diberikan kepada masyarakat setelah dikurangi provisi, administrasi, ditambah biaya transaksi Rp. 81.966.148.287,- dan dikurangi penyisihan kerugian Rp. 1.433.131.482,- menjadi sebesar Rp. 80.533.016.805,- dan mencapai 114.12% dari realisasi tahun 2024.

iii. Kewajiban

Posisi total kewajiban per 31 Desember 2025 tercapai sebesar Rp. 103.414.920.899,-dan mencapai 110.78% dari realisasi tahun 2024 dengan komposisi dari Tabungan mencapai Rp. 7.491.099.334,- Deposito mencapai Rp. 63.351.161.156,- Simpanan dari Bank Lain mencapai Rp. 26.151.013.579,- dan Pinjaman Diterima mencapai Rp. 4.921.851.787,-

iv. Laba bersih

Pencapaian Laba Bersih tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.963.269.010,- dan mencapai 79.38% dibandingkan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 2.473.153.008,-

v. Taksiran Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang digunakan pada tahun 2025 sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengingat omset pada tahun 2025 di atas Rp. 4.8 miliar dan dibawah Rp. 50 miliar maka perhitungan pajak menggunakan 2 tarif perhitungan sebagai berikut :

1) Tarif sebesar 11% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4,8 miliar)
2) Tarif sebesar 22% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 - 50 miliar)

Pada tahun 2025 omset PT. BPR Depo Mandiri sebesar Rp. 15.105.851.093,- sehingga tarif pajak menggunakan seperti tersebut di atas.

vi. Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan

Total pendapatan operasional dan non operasional yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 15.105.851.093,- atau mencapai 78.46% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.19.252.893.283,-

Adapun rincian pendapatan tersebut diperoleh dari :

a) Untuk pendapatan bunga kontraktual sebesar Rp. 12.930.072.243,-
b) Pendapatan Amortisasi Provisi sebesar Rp. 940.411.091,-
c) Pendapatan Lainnya Rp. 903.210.992,-
d) Pendapatan non operasional sebesar Rp. 332.156.767,-

2) Beban

Total Beban yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp. 12.705.755.844,- dan mencapai 78.69% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 16.146.241.626,- dengan rincian biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

a) Beban bunga kontraktual Rp. 5.850.315.219,-
b) Beban Pemasaran sebesar Rp. 229.672.970,-
c) Beban administrasi dan umum sebesar Rp. 6.196.313.759,-
d) Beban operasional lainnya sebesar Rp. 187.766.611,-
e) Beban Non Operasional sebesar Rp. 103.999.796,

7. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan.

Rasio keuangan perusahaan pada akhir tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

	Keterangan	Realisasi
I	Permodalan	
	Rasio KPMM (CAR)	28.20%
II	Aktiva Poduktif	
	1. NPL	2.54%
	2. Pemenuhan PPKA	100.00%
III	Rentabilitas	
	1. ROA	2.28%
	2. ROE	16.99%
	3. BOPO	85.57%
IV	Likuiditas	
	1. LDR	116.66%
	2. Cash Ratio	7.19%

8. Penjelasan Mengenai Non Performing Loan (NPL)

NPL (*Non Performing Loan*) Nett posisi 31 Desember 2025 sebesar 2.54%, penyebab hal tersebut dikarenakan :

1. Usaha Nasabah yang mengalami penurunan
2. Nasabah berhenti atau diberhentikan bekerja
3. Nasabah sakit yang berkepanjangan

Langkah dan Upaya yang dilakukan dalam menurunkan NPL ditahun 2025

1. Negosiasi penyelesaian kredit bermasalah antara debitur beserta keluarganya dengan pihak Bank, agar menjual agunannya atau pihak keluarga membantu secara sukarela penyelesaian kredit.
2. Melakukan pengambilalihan agunan (AYDA)
3. Melakukan penjualan agunan secara sukarela maupun melalui lelang KPKNL untuk debitur yang tidak kooperatif dalam penyelesaian kredit bermasalahnya
4. Dilakukan penagihan intensif

9. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Dalam sektor pembiayaan selain pemberian kepada UMKM, BPR juga memberikan kepada pensiunan seperti Pensiun PNS, Pensiun TNI, Pensiun POLRI, Veteran dan Janda/Duda dari pensiunan melalui kerjasama dengan Koperasi, serta kerjasama dengan vendor untuk pemberian kredit dengan invoice berjangka waktu pendek.

Terdapat AYDA kredit pada tanggal 30 Juni 2025 atas nama PT Luxury Mahatunggal Indonesia dengan baki debet sindikasi sebesar Rp. 5.000.000.000 dimana BPR Depo Mitra Mandiri sebagai leader sebesar Rp. 2.000.000.000,-, dan saat ini sedang proses penjualan agunan

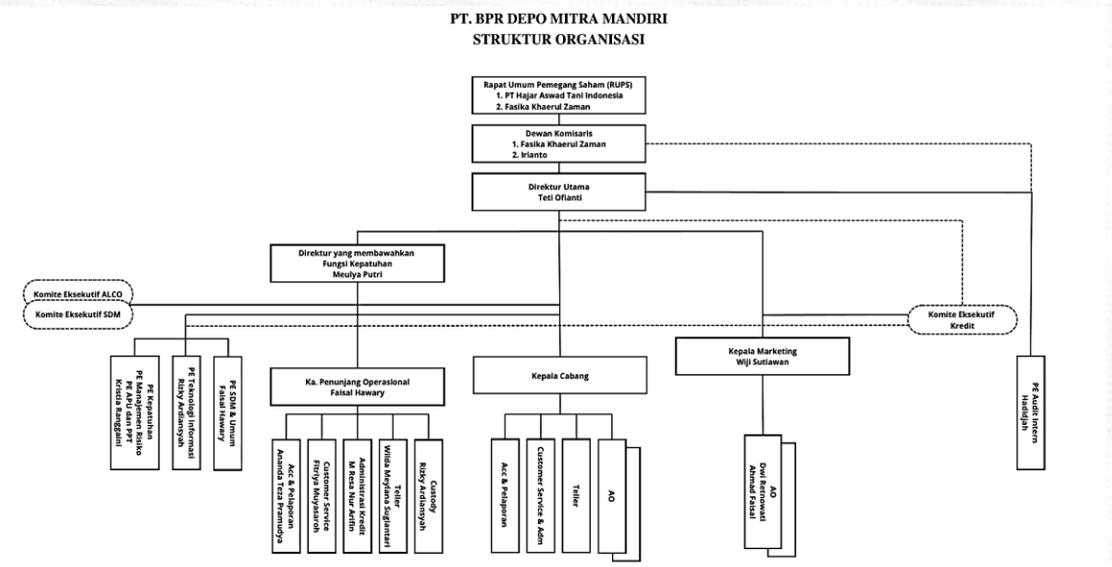
10. Strategi dan Kebijakan Manajemen

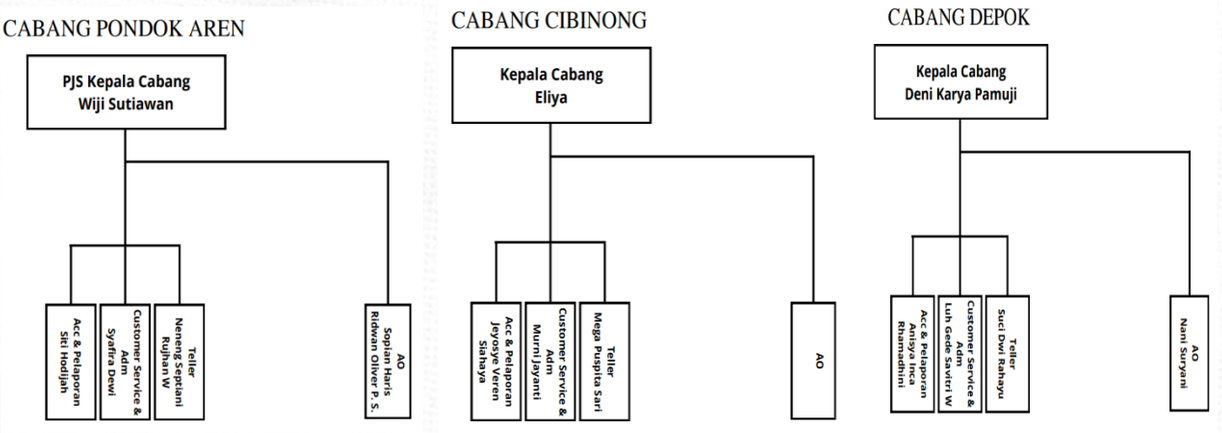
Strategi dan kebijakan manajemen yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan berpedoman pada Visi Perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang unggul, menghasilkan laba, dan tumbuh secara berkelanjutan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menawarkan kembali kredit kepada nasabah lunas;
b. Memberikan penawaran *top up*/*repeat order* kepada debitur *existing* yang lancar;
c. Menambah Petugas Jasa Pemasaran Lepas (PJPL) dan memberikan incentif kepada PJPL;

d. Pemberian edukasi literasi keuangan kepada ibu-ibu rumah tangga di lingkungan nasabah BPR Depo Mitra Mandiri berada;
e. Menambah kerjasama dengan Vendor untuk pembiayaan Kredit Karyawan dan *Fintech;*
f. Melakukan kerjasama dengan Open Bank dalam hal pembayaran listrik, pulsa, PAM dll;
g. Melakukan pelatihan dan pendidikan agar mutu karyawan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu;
h. Selalu menjaga kondisi Tingkat Kesehatan perusahaan dalam kondisi yang sehat Pada Faktor Manajemen Risiko, Tata Kelola, Permodalan dan Rentabilitas.

11. Stuktur Organisasi





12. Bidang Usaha

Bidang Usaha PT BPR Depo Mitra Mandiri, dengan kategori kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana

i. Tabungan Depo Harian

Tabungan dengan bunga menarik yang dihitung secara harian, penyetoran minimal Rp. 50.000,- penarikan tabungan dapat dilaksanakan setiap saat pada jam kerja serta tabungan dijamin Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Dengan suku bunga 4,75% per tahun

ii. TabunganKu

TabunganKu adalah rekening tabungan yang diwajibkan Bank Indonesia dengan suku bunga 2,00% dan tabungan tersebut diwajibkan untuk nasabah yang melakukan akad kredit. Dengan suku bunga 2,00% per tahun

iii. Tabungan Hajatan

Tabungan Depo Hajatan untuk mewujudkan rencana tertentu (hajatan) dikemudian hari seperti Tabungan Pendidikan, Tabungan Sunatan, Pernikahann, Hari Raya, Tabungan untuk liburan. Tabungan hanya dapat diambilpada saat jatuh tempo, sehingga dana akan tersedia pada saat dibutuhkan, dijamin Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Dengan suku bunga 5,75% per tahun.

iv. Tabungan Arisan

Tabungan Arisan adalah produk lanjutan tabungan depo, dimana tabungan tersebut diundi untuk mendapatkan bonus pada setiap bulan dan hadiah menarik di akhir periode.

v. Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Setoran minimum deposito adalah Rp.1.000.000,-

b. Produk Kredit

i. Kredit Guna Mandiri

Kredit Guna Mandiri adalah penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan agunan SHM/SHGB, Deposito dan BPKB Motor/Mobil

ii. Kredit Guna Mandiri Karyawan

Kredit Guna Mandiri Karyawan adalah penyediaan dana bagi karyawan perusahaan yang dipergunakan untuk investasi, modal kerja maupun konsumtif

dengan sistem pembayaran melalui pemotongan gaji oleh pihak perusahaan, koperasi atau dibayarkan langsung oleh karyawan yang bersangkutan

iii. Kredit Pensiun

Kredit Pensiun adalah penyediaan dana bagi pensiunan dalam hal ini bekerjasama dengan mitra pembiayaan yaitu Koperasi

c. Layanan

i. SDB (Safe Deposit Box)

Merupakan layanan penitipan barang yang disediakan oleh bank kepada nasabah berupa laci dengan penutup yang dapat dikunci tanpa bank mengetahui rincian atas barang yang disimpan dalam laci tersebut

13. Teknologi Informasi

Saat ini BPR menggunakan sistem *corebanking* NBP'Sys dari PT. Nusantara Bona Pasogit dan sampai saat ini berjalan dengan baik.

14. Perkembangan dan Target Pasar

Target pasar yang dituju oleh BPR Depo Mitra Mandiri yaitu tetap mengutamakan pemberian kredit kepada debitur Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), serta tetap melakukan pemberian kredit karyawan dan kredit pensiun.

15. Jumlah, Jenis dan Lokasi kantor

Kegiatan operasional BPR Depo Mitra Mandiri didukung oleh 4 (empat) kantor yaitu Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Cabang yang berlokasi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat

Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl Transyogi Rt 001/010 Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi. Telp. (021) 2281 7575

b. Kantor Cabang Pondok Aren :

Komplek Ruko Regia Blok RB – 1 No. 36 Jalan Graha Bintaro Utama Komplek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Telp. (021) 7345 0840, Faks (021) 7345 0746

c. Kantor Cabang Cibinong

Ruko Perum Cibinong Griya Asri Jl. KSR Dadi Kusmayadi Blok R3 No. 4 Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Bogor. Telp. (021) 8791 9767, Faks (021) 8791 9768

d. Kantor Cabang Depok

Komplek Ruko Saladin Square B-27, Jl Margonda Raya No. 39, Depok.
Telp. (021) 752 2323, Fax. (021) 77202767

16. Kerjasama BPR dengan Bank, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain atau lembaga lain

Ditahun 2025, kerjasama DMM dengan bank/lembaga lain terjadi dalam hal:

a. Kerjasama *linkage program* yaitu dengan Bank Jabar Banten
b. Kerjasama penjaminan kredit dan asuransi kerugian dengan:
i. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda
ii. PT. BPJS Ketenagakerjaan
c. Kerjasama penyedia jasa corebanking dengan PT. NBP Sys
d. Kerjasama pengikatan Agunan dan jasa kenotariatan lain dengan notaris-notaris di wilayah kerja DMM
e. Kerjasama pembiayaan *peer to peer (P2P) lending*
f. Kerjasama dengan BPR lain dalam rangka menjalin hubungan Antar Bank Aktiva antaranya :
    i. Bank Jabar Banten
    ii. BPR Antar Guna
    iii. BPR Arsham Sejahtera
    iv. BPR Artatama Sejahtera
    v. BPR Artha Bersama
    vi. BPR Central Sejahtera
    vii. BPR Ceper
    viii. BPR Ciledug Dhana Semesta
    ix. BPR Dana Mandiri Bogor
    x. BPR Dana Raya Jakarta
    xi. BPR Danaberkah Lestari
    xii. BPR Fundbank Artha Pertiwi
    xiii. BPR Handalan Danagraha
    xiv. BPR Hasa Mitra Jawa Barat
    xv. BPR Koperindo Jaya
    xvi. BPR Kredit Mandiri Indonesia
    xvii. BPR Luna Sinar Indonesia
    xviii. BPR Menaramas Mitra
    xix. BPR Mitra Sejahtera Lestari
    xx. BPR Niji
    xxi. BPR Nusantara Bona Pasogit 11
    xxii. BPR Nusantara Bona Pasogit 29
    xxiii. BPR Nusantara Bona Pasogit 32
    xxiv. BPR Rama Ganda

xxv. BPR Sarana Utama Multidana
xxvi. BPR Wingsati
xxvii. BPR Xen
xxviii. BPRS Artha Madani

g. Kerjasama dengan BPR lain dalam rangka menjalin hubungan Antar Bank Pasiva antaranya :

i. Perumda BPR Bank Kota Bogor
ii. BPR Artha Kurnia Raharja
iii. BPR Bantoru Perintis
iv. BPR Bumidhana
v. BPR Cibitung Permai
vi. BPR Daya Lumbung Asia
vii. BPR Hagati Wiradana Sejahtera
viii. BPR Indra Candra
ix. BPR Kartini
x. BPR Lestari Bali
xi. BPR Lestari Banten
xii. BPR Lingga Sejahtera
xiii. BPR Mitra Primalestari
xiv. BPR Muliatama Dananjaya
xv. BPR Multi Artha Bersama
xvi. BPR Multi Sembada Dana
xvii. BPR Nusantara Bona Pasogit 15
xviii. BPR Nusantara Bona Pasogit Sembilan Belas
xix. BPR Prima Sejahtera
xx. BPR Prismaberlian Danarta
xxi. BPR Sejahtera Batam
xxii. BPR Sukma Kemang Agung
xxiii. BPR Sumber Artha Rahayu
xxiv. BPR Supra Artapersada

17. Kepemilikan Saham

NO	NAMA	SAHAM (LEMBAR)	NOMINAL SAHAM	PROSENTASE
1.	PT. Hajar Aswad Tani Indonesia	8,078	8,078,000,000	95%
2.	Fasika Khaerul Zaman	424	424,000,000	5%
	Total	8,502	8,502,000,000	100%

18. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Bidang Tugas dan Komposisi Pegawai

Jumlah tenaga kerja sampai dengan akhir tahun 2025 terdiri dari 4 orang Pengurus, 27 orang Karyawan serta 5 orang Jasa Pemasaran, Jasa Pelayanan Umum dan Peserta Magang. Adapun rincian tenaga kerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

Karyawan	Semester I th 2025		Semester II th 2025	
	Jml	Pendidikan	Jml	Pendidikan
Kepala Marketing	1	S1	1	S1
Kepala Support	-	-	-	-
Kepala Kantor Cabang	3	S1/D3	3	S1/D3
Kepala Grup	-	-	-	-
Kepala Kantor Kas	-	-	-	-
AO dan Marketing	5	S1/SMA	4	SMA
Analis	-	-	-	-
Audit Intern	1	SMA	1	SMA
PE Teknologi Informasi	1	S1	1	S1
PE Kepatuhan, PE APU PPT dan PE Manajemen Risiko	1	S1	1	S1
PE SDM & Umum	1	S1	1	S1
Kepala Penunjang Operasional	1	SMA	1	S1
CS/CSA	4	S1/D3/SMA	4	S1/D3/SMA
Teller	4	S1/SMA	4	S1/SMA
Adminstrasi Kredit	1	SMA	1	SMA
Accounting	4	S1/SMA	5	S1/SMA
Staf	-	-	-	-
Jumlah	27		27	
Agen				
JAO, PJPU dan Magang	4	SMK	5	SMK
Total Tenaga Kerja	31		32	

Jumlah karyawan tersebut adalah untuk mendukung kegiatan operasional di Kantor Pusat, Kantor Cabang Pondok Aren, Kantor Cabang Cibinong dan Kantor Cabang Depok

b. Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan pada tahun 2025 telah dilakukan pendidikan baik oleh pihak internal maupun ekternal perusahaan. Adapun materi pendidikan yang diselenggarakan antara lain :

i. Seminar Nasional "Penguatan *Cyber Security* Menunjang Peran BPR-BPRS dalam Mendukung UMKM di Era Digitalisasi Menuju Indonesia Emas"
ii. Pelatihan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Privat (SAKEP) pada Aplikasi NBP Sys
iii. Pelatihan *Fraud Risk Management* Pada BPR
iv. *Seminar Economy Mastery* Forum 2025
v. Edukasi Perpajakan Coretax SPT Tahunan 2025
vi. Pelatihan Membuat Rencana Bisnis
vii. Refresh APU PPT PPPSPM & Perlindungan Konsumen
viii. Pelatihan Sertifikasi SDM Berbasis Kompetensi Dengan Kualifikasi Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan
ix. Pelatihan *Beauty Class*

x. Kegiatan *Capacity Building* BPR dan BPRS
xi. Pendidikan Kebijakan Penggunaan laba, Pembagian Deviden dan Remunerasi sesuai POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Tata Kelola
xii. Pelatihan Laporan Bulanan
xiii. Sosialisasi Surat Keputusan Direksi terkait Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Fungsional
xiv. Sosialisasi Surat Edaran Direksi terkait Mekanisme Penagihan di PT BPR Depo Mitra Mandiri
xv. Sosialisasi Surat Edaran Direksi tersdkait Pemberian Diskon Denda Extracontable kepada Debitur dan Pemberian Insentif kepada Karyawan yang berhasil melakukan Penagihan Denda Extracontable periode tanggal 03 November 2025 sd 26 Desember 2025
xvi. Sosialisasi Asuransi Kerugian dan Kendaraan Bumida
xvii. Sosialisasi RBB dan RAKB 2026

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Kata Pengantar

Pada tahun 2025, PT. BPR Depo Mitra Mandiri mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025. Implementasi ini selaras dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Program kerja yang dirancang dalam RAKB diterapkan oleh PT. BPR Depo Mitra Mandiri dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat), sebagai bagian dari entitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK), memahami betul urgensi pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan berpegang pada prinsip *triple bottom line* yakni *people* (kemaslahatan masyarakat) , *profit* (laba) serta *planet* (kelestarian lingkungan) dalam operasional bisnis Bank melalui harmonisasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

PT. BPR Depo Mitra Mandiri, selaku institusi perantara, memiliki peran penting yang krusial. Sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat (DPK) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman, BPR harus cermat dalam memilih debitur. Prioritas harus diberikan pada usaha yang tidak merusak lingkungan, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan keuntungan melalui pendapatan bunga kredit.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan. Hal ini merupakan upaya kolektif sektor jasa keuangan dalam mendukung realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan keberlangsungan bisnis bank. Mengabaikan isu sosial dan lingkungan dapat meningkatkan risiko, terutama risiko kredit akibat potensi gagal bayar *(default)* dari debitur yang bisnisnya merugikan lingkungan dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SR (*Sustainability Report*) PT. BPR Depo Mitra Mandiri Tahun 2025 ini menyajikan data dan informasi terkait performa keberlanjutan Bank, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Laporan Keberlanjutan ini disusun dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017.

1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan

Sesuai POJK No. 51 /POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR ***(Sustainability Report)*** Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026 bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan melalui website PT BPR Depo Mitra Mandiri

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik *(feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2025 disusun dengan mengakomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. PT. BPR Depo Mitra Mandiri membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2025 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan keberlanjutan PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Perusahaan sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu- isu yang berpengaruh signifkan bagi PT. BPR Depo Mitra Mandiri serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) Prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh PT. BPR Depo Mitra Mandiri adalah:

1. Investasi yang bertanggung jawab; adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisi potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan; Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan PT. BPR Depo Mitra Mandiri kami dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup; Kami telah memiliki prinsip kehati-hatian *(Prudential Banking)*. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

4. Prinsip Tata Kelola; Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip- prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif; Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan produk Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web PT. BPR Depo Mitra Mandiri https://bprdepomitramandiri.co.id
6. Prinsip Inklusif; Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan PT. BPR Depo Mitra Mandiri.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi; Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat.

Sedangkan prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) adalah:

1. Menghimpun Tabungan Khusus Pelajar
2. Meningkatkan Penyaluran Kredit dan Penghimpunan Dana Masyarakat Umum Khususnya UMKM

Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals)*. Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PT. BPR Depo Mitra Mandiri mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan

dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT”.
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan

Tabel Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Nominal uang dalam ribuan rupiah

Keterangan	Target 2025	2025	2024	2023
Outstanding UMKM	48.540.260	53.564.669	53.563.264	44.728.980
Pendapatan Operasional Bank (Rp)	17.229.530	14.773.694	19.037.445	13.199.870
Laba Bersih Bank (Rp)	2.203.616	1.963.269	2.473.153	2.012.565
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan				
Jumlah jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan		3	3	3

Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu kategori KUB (Kredit Usaha Berkelanjutan), saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab dimana Bank mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasabah dalam penyaluran kredit maupun dana dimana produk yang disalurkan yaitu tabungan, deposito dan kredit.

Aspek Lingkungan Hidup

Tabel Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2025	2024	2023
Beban Penggunaan ATK (Rp)	23.655.680	24.726.304	22.835.300
Beban Penggunaan Listrik (Rp)	72.274.157	70.688.721	53.959.224
Beban Penggunaan Air (Rp)	3.174.000	2.916.600	2.494.600
Beban Penggunaan BBM (Rp)	41.482.348	42.319.534	51.587.430

Kriteria KUB (Kredit Usaha Berkelanjutan) yang diharapkan untuk didukung oleh lembaga keuangan mencakup efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bank menyadari bahwa untuk mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan usaha yang mempertimbangkan dampak lingkungan harus dimulai dari cara Bank beroperasi.

Bank telah menempatkan operasional bank ramah lingkungan sebagai bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan. Dalam rangka memastikan kegiatan operasional dilakukan

dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, budaya kesadaran lingkungan penting untuk dibangun di dalam Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan data lingkungan di Kantor pada tahun 2025.

Dalam hal operasi ramah lingkungan, sosialisasi telah dilaksanakan di lingkungan kantor pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari budaya perusahaan terkait dengan peduli lingkungan.

1. Efisiensi Penggunaan ATK (Alat Tulis Kantor)

   Kertas merupakan kebutuhan penting dalam operasional Bank. Kertas antara lain dipakai untuk administrasi perkantoran, seperti surat-menyurat, memo, mencetak berbagai laporan perusahaan, pendaftaran, dan pencetakan buku nasabah, pencatatan transaksi setoran, penarikan dan lain-lain. Bank menyadari bahwa bahan baku kertas adalah bubur kayu yang didapat dari penebangan kayu. Karena itu, Bank berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas. Dengan penghematan kertas, maka Bank turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca. Tahun 2025, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan kertas bekas (sisi sebaliknya) untuk mencetak draft surat/memo. Ke depan dengan adanya penerapan digitalisasi pelaporan yang dicanangkan oleh OJK melalui POJK No. 23 Tahun 2025 yang menggeser semua laporan luring (*offline*) menjadi daring (*online*) membantu Industri BPR untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

2. Efisiensi Penggunaan Listrik

   Listrik digunakan untuk penerangan, penggerak sarana-prasarana kantor seperti mesin fotokopi, AC, Komputer dan sebagainya. Bank menyadari bahwa sebagian besar listrik yang dipakai saat ini bersumber dari PLTU, yang menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit, yang termasuk sumber energi tak terbarukan. Oleh karena ketersediaan listrik semakin terbatas, Bank berupaya untuk melakukan efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan energi. Adapun program pengelolaan energi yang dilakukan. Berdasarkan tabel diatas terlihat pemakaian listrik selama tiga tahun terakhir di Bank Kantor mengalami kenaikan, sehingga program hemat energi yang dicanangkan Bank dapat terlaksana dengan baik.

3. Efisiensi Penggunaan Air

   Penggunaan Air dilakukan penghematan dengan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan air dalam yang terdapat di wadah air dengan memastikan penggunaan air dipakai sesuai dengan kebutuhan kantor termasuk pelayanan kepada konsumen.

4. Efisiensi Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak)

   BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Sementara itu, selain dipakai untuk menggerakkan genset, BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Kategori yang

sama berlaku untuk jenis BBM yang digunakan Bank, yaitu bensin dan solar. Berdasarkan tabel diatas terlihat pemakaian BBM selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan sebelumnya kendaraan roda 4 yang digunakan sebanyak 3 menjadi 2 kendaraan.

Aspek Sosial

Tabel Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial

a. Kinerja Aspek Sosial – Internal Bank

Keterangan	2025	2024	2023
Jumlah Pegawai	27	29	29
Jumlah Direksi dan Komisaris	4	4	4
- Pria	12	12	11
- Wanita	19	21	22

b. Kinerja Aspek Sosial – Kegiatan Sosial

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2025	2024	2023
Dana Sosial Yang Disalurkan	0	0	0
Jumlah Asosiasi	0	0	0

Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) haruslah senantiasa ditanamkan kepada seluruh pegawai agar dapat menjadi budaya yang mampu mendukung keberlanjutan operasional Bank. K3 merupakan aspek penting yang wajib diterapkan di seluruh kegiatan operasi, dalam bekerja dengan sesama pegawai, melayani nasabah, bahkan berinteraksi dengan keluarga maupun orang lain.

Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat berkontribusi untuk mendukung iklim kerja yang kondusif sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Guna memastikan hal ini, peran pegawai sangatlah penting. Oleh karena itu Bank melibatkan pegawai dalam strategi dan kebijakan terkait K3, diantaranya mencakup:

1. Memastikan fasilitas kantor dalam kondisi sangat baik
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai budaya K3
3. Meningkatkan peran dan fungsi semua sektor dalam pelaksanaan K3

3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR DEPO MITRA MANDIRI
Alamat	Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No 6-8, Jl. Transyogi Rt.001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi 17435
Nomor Telepon	(021) 2281 7575
Email	bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id
Website	www.bprdepomitramandiri.co.id

Adapun Visi dan Misi PT BPR Depo Mitra Mandiri sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi perusahaan unggul, menghasilkan laba dan tumbuh secara berkelanjutan

b. Misi

Menjadi tempat yang sehat untuk berkarya, berkehidupan dan mengembangkan profesionalisme bagi seluruh karyawan

Skala Usaha Bank :

a. Total Aset dan Kewajiban

Keterangan	2025	2024	2023
Total Asset	116,930,716,122	108,257,919,350	93,706,693,180
Total Kewajiban	103,414,920,900	93,349,616,915	80,155,243,753

b. Jumlah Pegawai

Sepanjang tahun 2025 Bank memiliki SDM total 31 karyawan dengan demografi pegawai secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Berdasarkan Level Organisasi

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Dewan Komisaris	2	6.5%
2	Direksi	2	6.5%
3	Pejabat Eksekutif	8	25.8%
4	Pelaksana	19	61.3%
	Jumlah	31	100.0%

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Magister	2	6.5%
2	Sarjana	15	48.4%
3	Diploma III	2	6.5%
4	SMA	12	38.7%
	Jumlah	31	100.0%

Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Tetap	21	67.7%
2	Kontrak	10	32.3%
	Jumlah	31	100.0%

Berdasarkan Rentang Usia

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Diatas 50 Tahun	5	16.1%
2	41 s/d 50 Tahun	4	12.9%
3	31 s/d 40 Tahun	4	12.9%
4	21 s/d 30 Tahun	18	58.1%
	Jumlah	31	100.0%

Berdasarkan Generasi

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Baby Boomers 1946 - 1965	1	3.2%
2	Generation X 1966 - 1980	8	25.8%
3	Generation Y 1981 - 1996	8	25.8%
4	Generation Z 1997 - 2012	14	45.2%
	Jumlah	31	100.0%

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	12	38.7%
2	Perempuan	19	61.3%
	Jumlah	31	100.0%

c. Persentasi Kepemilikan Saham

No	Nama	Saham	Nominal	Persentase
1	PT Hajar Aswad Tani Indonesia	8,078	8,078,000,000	95%
2	Fasika Khaerul Zaman	424	424,000,000	5%
	Total	8,502	8,502,000,000	100%

d. Wilayah Operasional

Kegiatan operasional BPR Depo Mitra Mandiri di dukung oleh 4 (empat) kantor yaitu Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Cabang yang berlokasi sebagai berikut :

i. Kantor Pusat

Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl Transyogi Rt 001/010 Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi

Telp. (021) 2281 7575

ii. Kantor Cabang Pondok Aren

Komplek Ruko Regia Blok RB – 1 No. 36 Jalan Graha Bintaro Utama Komplek Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Telp. (021) 7345 0840, Faks (021) 7345 0746

iii. Kantor Cabang Cibinong

Ruko Perum Cibinong Griya Asri Jl. KSR Dadi Kusmayadi Blok R3 No. 4 Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Bogor.

Telp. (021) 8791 9767, Faks (021) 8791 9768

iv. Kantor Cabang Depok

Komplek Ruko Saladin Square B-27 , Jl Margonda Raya No. 39, Depok

Telp. (021) 752 2323, Fax. (021) 77202767

e. Produk, layanan dan kegiatan usaha yang dijalankan

Produk

No	Jenis Produk	Deskripsi
1	Tabungan	Tabungan Depo Harian
		Tabungan Ku
		Tabungan Hajatan
		Tabungan Depo Arisan
2	Deposito	Deposito Berjangka 1 Bulan
		Deposito Berjangka 3 Bulan
		Deposito Berjangka 6 Bulan
		Deposito Berjangka 12 Bulan
3	Kredit	Kredit Guna Mandiri
		Kredit Guna Mandiri Karyawan
		Kredit Pensiun

Penghimpunan Dana

a. Tabungan Depo Harian

Tabungan dengan bunga menarik yang dihitung secara harian, penyetoran minimal Rp. 50.000, penarikan tabungan dapat dilaksanakan setiap saat pada jam kerja serta tabungan dijamin Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Dengan suku bunga 4,75 % per tahun

b. TabunganKu

TabunganKu adalah rekening tabungan yang diwajibkan Bank Indonesia dengan suku bunga 2,00% dan tabungan tersebut diwajibkan untuk nasabah yang melakukan akad kredit. Dengan suku bunga 2,00 % per tahun

c. Tabungan Hajatan

Tabungan Depo Hajatan untuk mewujudkan rencana tertentu (hajatan) dikemudian hari seperti Tabungan Pendidikan, Tabungan Sunatan, Pernikahan, Hari Raya, Tabungan untuk liburan. Tabungan hanya dapat diambil pada saat jatoh tempo, sehingga dana akan tersedia pada saat dibutuhkan, dijamin Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Dengan suku bunga 5,75 % per tahun

d. Tabungan Arisan

Tabungan Arisan adalah produk lanjutan tabungan depo, dimana tabungan tersebut diundi untuk mendapatkan bonus pada setiap bulan dan hadiah menarik diperiode terakhir.

e. Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Setoran minimum deposito adalah Rp. 1.000.000,-

Produk Kredit

a. **Kredit Guna Mandiri**

Kredit Guna Mandiri adalah penyedia dana kepada debitur dengan tujuan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan agunan SHM/SHGB, Deposito dan BPKB Motor/Mobil, Emas

b. **Kredit Guna Mandiri Karyawan**

Kredit Guna Mandiri Karyawan adalah penyedia dana bagi karyawan perusahaan yang dipergunakan untuk investasi, modal kerja maupun konsumtif dengan sistem pembayaran melalui pemotongan gaji oleh pihak perusahaan, koperasi atau dibayarkan langsung oleh karyawan yang bersangkutan

c. **Kredit Pensiun**

Kredit Pensiun adalah penyedia dana bagi pensiunan dalam hal ini bekerjasama dengan mitra pembiayaan yaitu koperasi

Layanan

a. SDB (Safe Deposit Box)

Merupakan layanan penitipan barang yang disediakan oleh bank kepada nasabah berupa laci dengan penutupan yang dapat dikunci yang diperuntukan bagi nasabah tanpa bank mengetahui rincian atas barang yang disimpan dalam laci tersebut.

f. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)

g. Penjelasan Lainnya

BPR DEPO MITRA MANDIRI mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

4. Penjelasan Direksi terkait Pengembangan KB dan Permasalahan yang Dihadapi

a. Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Bank menetapkan strategi keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis dengan mengacu pada penerapan prinsip keuangan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan usaha yang sehat, inklusif, dan berkesinambungan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, Bank mengarahkan penyaluran kredit pada sektor-sektor produktif, khususnya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan tetap memperhatikan aspek risiko lingkungan dan sosial. Bank juga mulai mendorong pembiayaan kepada usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dari sisi operasional, Bank berupaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi, pengurangan penggunaan kertas (*paperless*), serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Dalam aspek tata kelola, Bank melakukan penguatan kebijakan internal dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam prosedur kerja dan manajemen risiko. Hal ini termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang

berlaku.

Selain itu, Bank juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi terkait keuangan berkelanjutan, manajemen risiko, dan digitalisasi, guna mendukung implementasi strategi keberlanjutan secara optimal.

Dengan strategi tersebut, Bank optimis dapat menghadapi tantangan bisnis yang dinamis, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan keserjahteraan Masyarakat.

c. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menetapkan RAKB dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025. Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapakan operasional perbankan hijau.

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank *(prudential banking)* dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional perusahaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Strategi Pencapaian Target

Bank senantiasa meningkatkan strategi-strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan. Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan keberlanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2025, PT. BPR Depo Mitra Mandiri belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan konstribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.

Apresiasi

BPR memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama- sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Dukungan dan rasa percaya yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan.

e. Tantangan Internal

- Fokus Bisnis Bank : Masih terdapat konsentrasi kredit pada sektor tertentu sehingga meningkatkan risiko konsentrasi dan membatasi diversifikasi usaha.
- Operasional Bank : Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan proses digitalisasi yang belum optimal menyebabkan efisiensi operasional belum maksimal.
- Kebijakan Internal : Perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan internal agar

selaras dengan prinsip keberlanjutan serta regulasi yang terus berkembang.

- Keahlian SDM Bank : Kualitas dan kompetensi SDM, khususnya dalam pemahaman manajemen risiko, digitalisasi, dan implementasi prinsip keberlanjutan, masih perlu ditingkatkan.
- Lainnya : Keterbatasan modal inti dan kapasitas ekspansi usaha yang berdampak pada kemampuan bank dalam memperluas layanan dan inovasi produk.
- Upaya yang dilakukan : Bank melakukan integrasi bertahap prinsip keberlanjutan dalam kebijakan kredit, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (paperless dan hemat energi), mengembangkan pedoman internal terkait ESG, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta mulai membangun sistem pelaporan keberlanjutan.

f. Tantangan Ekternal

- Kebijakan Pemerintah : Adanya tuntutan regulasi terkait keuangan berkelanjutan yang terus berkembang mengharuskan bank melakukan penyesuaian kebijakan dan pelaporan secara berkelanjutan.
- Perekonomian Nasional, Regional, dan Global : Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam menjalankan usaha berkelanjutan serta menurunkan minat investasi pada sektor hijau.
- Lainnya : Persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat, termasuk dari lembaga keuangan non-bank dan fintech, serta perubahan perilaku nasabah menuju layanan digital.
- Upaya yang dilakukan : Bank secara aktif melakukan pemantauan terhadap perkembangan regulasi dan kondisi ekonomi, meningkatkan manajemen risiko kredit, memperkuat hubungan dengan nasabah, mengembangkan produk dan layanan berbasis kebutuhan pasar, serta melakukan transformasi digital secara bertahap.

Tugas dan Pengembangan Kompetensi dan Produk

Aspek	Jumlah		
	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
Program Pengembangan Bagi Internal Bank Pada Setiap Level Jabatan			
Jumlah Kegiatan Pengembangan Untuk Dewan Komisaris	0	0	0
Jumlah Kegiatan Pengembangan Untuk Direksi	4	6	4
Jumlah Kegiatan Pengembangan Untuk Pejabat Eksekutif	10	15	11
Jumlah Kegiatan Pengembangan Untuk Pegawai	7	12	8
Struktur Organisasi dan Pengendalian Internal			
Jumlah Unit Kerja yang menangani Keuangan Berkelanjutan dan Pengendalian Risiko Iklim	0	0	0
Jumlah SPO Manajemen Risiko terkait Keuangan Berkelanjutan	0	0	0
Verifikasi Pihak Independen			
Verifikasi Laporan Keberlanjutan	0		
Verifikasi Lembaga Perhitungan Emisi	0		
Konsultan Lainnya	0		
Penjelasan Mengenai Pemangku Kepentingan			
Pihak Pemangku Kepentingan			
1. Pemegang Saham	0		
2. Pemerintah	0		
3. Otorisasi	0		
4. Akademis	0		
5. Praktisi	0		
6. Pegawai	0		
7. Nasabah	0		
8. Lainnya	0		

5. Tata Kelola Berkelanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggung jawaban *(responsibility)*, independensi *(independency)*, dan kewajaran (*fairness)*. Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan etika perbakan.

Struktur tata kelola perusahaan yang baik, adalah sebagai berikut:

1. RUPS, adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang dan/ atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris, adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi, adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan *good corporate governance,* Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*frame work)* yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure)*, Proses Tata Kelola (*Governance Process)* dan Hasil Tata Kelola *(Governance Outcome)*. Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

   Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

   a. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
   b. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)*
   d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

   Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang- undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

a. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
b. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
c. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* kepada Dewan Komisaris.
d. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
e. Memantau satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan berkelanjutan.

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, PT. BPR Depo Mitra Mandiri berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Penunjang Operasional dan Kepala Marketing.

Dengan adanya Keuangan Berkelanjutan diharapkan dapat melalukan tugas adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama-sama merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan;
3. Melakukan koordinasi terkait Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal-hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
4. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab untuk mendapat persetujuan;
5. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Pembekalan terhadap keuangan berkelanjutan dilakukan melalui pemberian pelatihan yang rencana akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2026 kepada seluruh karyawan.

Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang

ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2026.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Bank mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan pengaruh dan dampaknya terkait keuangan berkelanjutan. Bank melibatkan pengurus dan seluruh karyawan dalam keberlangsungan keuangan berkelanjutan

Peluang dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kesadaran mengenai prinsip keuangan berkelanjutan telah menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam implementasi dan praktiknya selama tahun 2025 sehingga diperlukan ditingkatkan konsistensi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, Bank mengidentifikasi adanya peluang dalam pembiayaan berkelanjutan terutama untuk melayani segmen ritel dan UMKM untuk mendorong akselerasi usaha berwawasan lingkungan di masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua penerapan keuangan berkelanjutan di PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran karyawan PT. BPR Depo Mitra Mandiri di tahun 2025 terhadap keuangan berkelanjutan, sehingga terus ditingkatkan pengetahuan dan kesadaran penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.
2. Penerapan keuangan berkelanjutan juga membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari Pemerintah setempat, pelaku bisnis dan masyarakat
3. Kesadaran nasabah dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung dan menerapkan keuangan berkelanjutan. Pengembangan organisasi, produk dan kebijakan internal yang perlu disusun dan dikembangkan memerlukan waktu dan pengetahuan yang cukup terkait Keuangan Berkelanjutan.

6. Kinerja Keberlanjutan

6.1 Kinerja Ekonomi

Tabel Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Nominal uang dalam ribuan rupiah

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)			
Total Aset	116.930.716	108.257.919	93.706.693
Kredit/Pembiayaan Bank	81.966.148	71.890.751	61.267.651
Dana Pihak Ketiga	70.842.260	66.108.042	57.524.930
Pendapatan Operasional	14.773.694	19.037.445	13.199.870
Beban Operasional	12.601.756	16.098.864	11.027.539
Laba Bersih	1.963.269	2.472.153	2.012.565
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	28,20	39,52	16,89
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,74	3,48	2,12
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	5,16	3,87	2,59
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	1,63	1,24	1,26
NPL gross	4,06	5,40	3,85
NPL nett	2,54	3,88	2,03
Return on Asset (ROA)	2,28	2,21	2,99
Return on Equity (ROE)	16,99	18,09	14,85
Net Interest Margin (NIM)	6,94	5,79	9,84
Rasio Efisiensi (BOPO)	85,57	84,54	83,54
Loan to Deposit Ratio (LDR)	116,66	109,82	107,82

Tabel Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Nominal uang dalam ribuan rupiah

Keterangan	2025	2024	2023
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan			
Penghimpunan Dana (Rp)	0,00	0,00	0,00
Penyaluran Dana (Rp)	48.540.260	53.564.669	53.563.264
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0,00	0,00	0,00
Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0,00	0,00	0,00
Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0,00	0,00	0,00
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan (%)	0,00	0,00	0,00

6.2 Kinerja Sosial

Komitmen Perusahaan

PT. BPR Depo Mitra Mandiri memberikan layanan merata kepada seluruh nasabah tanpa memandang kelas pendapatan masyarakat.

a. Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

   BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di wilayah kerja masing-masing karyawan.

b. Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

   PT. BPR Depo Mitra Mandiri ikut berkontribusi santunan kepada wilayah kerja sekitar

6.3 Kinerja Lingkungan Hidup

c. Kegiatan Internal

PT BPR Depo Mitra Mandiri mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (***Reduce, Reuse end Recycle)***. Sosialisasi atas prinsip- prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/ material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional PT BPR Depo Mitra Mandiri tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.

d. Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan- bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan tumbler yang disiapkan pegawai masing-masing.

Tabel Uraian Penggunaan Energi

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	Penggunaan Pada Tahun Laporan
Listrik (Rp)	72.274.157
Volume Air dari PDAM (Rp)	3.174.000
Penggunaan BBM (Rp)	41.482.348

6.4 Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

a. Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, PT BPR Depo Mitra Mandiri senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.
Dalam melakukan inovasi, PT BPR Depo Mitra Mandiri melakukannya dengan prinsip

Kehati - hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun inovasi dan pengembangan produk/ jasa yang dilakukan PT BPR Depo Mitra Mandiri selama tahun 2025 antara lain meluncurkan Layanan Safe Deposit Box, Kredit kepada pensiun dan tabungan Arisan.

Selain itu, Perusahaan juga mengembangkan program kredit Scoring, program Pembuatan Aplikasi Monitoring Kredit, dan Pengembangan Web Based Laporan Tahunan bekerja sama dengan Vendor.

b. Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan.

Semua produk dan jasa yang ditawarkan PT BPR Depo Mitra Mandiri telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perseroan secara kontinu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, PT BPR Depo Mitra Mandiri juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

c. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

PT BPR Depo Mitra Mandiri telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka PT BPR Depo Mitra Mandiri akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati- hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan PT BPR Depo Mitra Mandiri pada tahun pelaporan.

d. Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal PT BPR Depo Mitra Mandiri maupun perintah dari regulator (OJK).

e. Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

PT BPR Depo Mitra Mandiri belum melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan

terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2025 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen

Tidak Terdapat Laporan atas Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen.

8. Umpan Balik

Lembar Umpan Balik untuk Pembaca

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi PT BPR Depo Mitra Mandiri yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, PT BPR Depo Mitra Mandiri menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

PT BPR Depo Mitra Mandiri memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik *(feedback)* mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

Sdri. Fitra Setya Dwi Utami

Kepala Penunjang Operasional

PT BPR Depo Mitra Mandiri

Alamat : Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No 6-8, Jl. Transyogi Rt.001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi 17435
Tlp : (021) 2281 7575
Email : bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id
Website : www.bprdepomitramandiri.co.id

9. Tanggapan Bank terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang pertama kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

LAPORAN TATA KELOLA

Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri - *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai budaya. Budaya *Good Corporate Governance* (GCG) yang semakin kuat hingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT. BPR Depo Mitra Mandiri dalam bisnis dan pencapaian visinya. Dan Penerapan Tata Kelola menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan BPR yang perlu diperhatikan penilaiannya.

Dengan Tata Kelola yang baik, tentunya perusahaan diharapkan tetap *survive* ditengah-tengah persaingan bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Tata Kelola yang baik menghadirkan manajemen perusahaan yang sehat dan profesional, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan visi dan misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini kemudian akan semakin menguatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menekankan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dua hal penting. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Kedua hal tersebut diterapkan berdasarkan lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1. *Transparancy* (Keterbukaan), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggung jawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku.

4. *Independence* (Kemandirian), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun yang ingin dicapai PT. BPR Depo Mitra Mandiri dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Depo Mitra Mandiri ditujukan antara lain untuk :

a. Melaksanakan Visi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk menjadi "Perusahaan yang unggul, menghasilkan laba dan tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi harapan pemilik dan *stakeholder.*"

b. Melaksanakan Misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk "Menjadi tempat yang sehat untuk berkarya, berkehidupan dan mengembangkan profesionalisme bagi seluruh karyawan."

c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders)* dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

e. Meningkatkan kepercayaan para investor.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dilakukan dengan mengacu kepada:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara

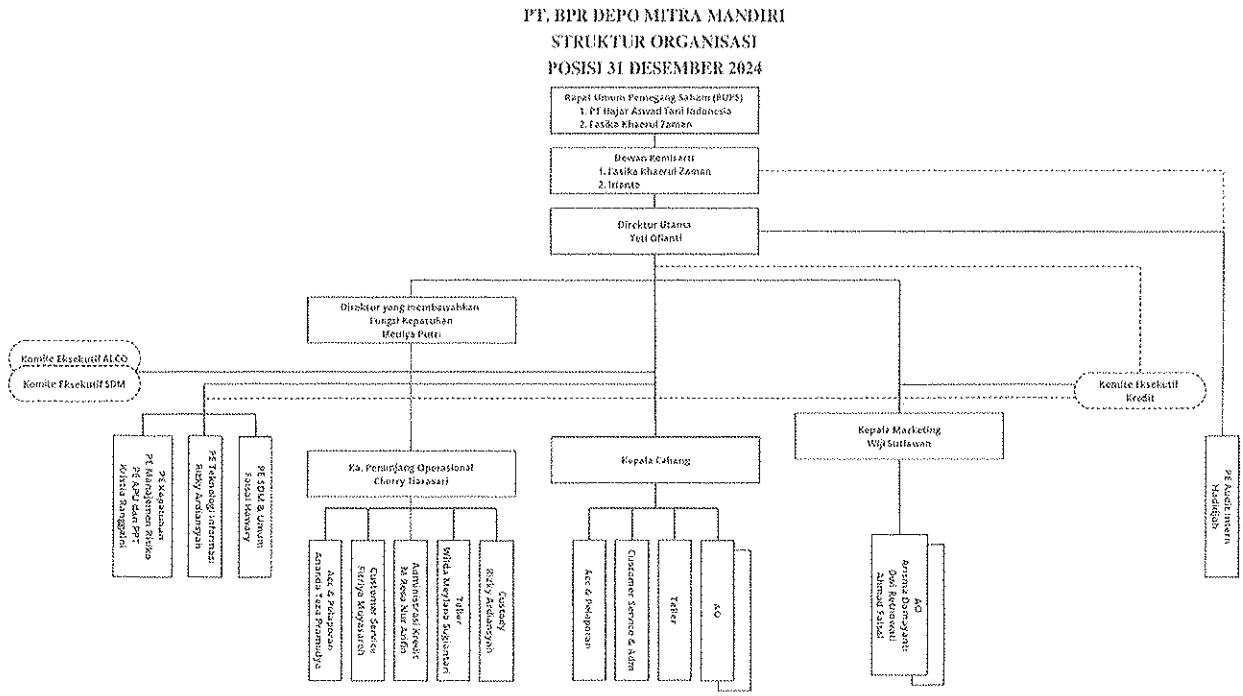
kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Depo Mitra Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola BPR

4. Struktur Organisasi PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT. BPR Depo Mitra Mandiri mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri



Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direktur Utama;
4. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
5. Ka. Marketing;
6. Pejabat Eksekutif yang berfungsi sebagai :
    a. Pejabat Eksekutif Kepatuhan;
    b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko;
    c. Pejabat Eksekutif APU dan PPT;
    d. Pejabat Eksekutif Teknologi Informasi;
    e. Pejabat Eksekutif SDM dan Umum;
    f. Pejabat Eksekutif Audit Intern
7. Ka. Cabang;
8. Ka. Penunjang Operasional.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola *(Good Corporate Govermance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, mengungkap seluruh aspek penerapan Tata Kelola paling kurang meliputi :

a. Ringkasan Hasil Penilaian *(Self Assessment)* atas Penerapan Tata Kelola
b. Pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu :
    i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi.
    ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.
    iii. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
c. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu:
    i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR.
    ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
d. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :
    i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.
    ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :
    i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.
    ii. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
f. Hubungan keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :
    i. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.
    ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
g. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
h. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
i. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun.
j. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.
k. Jumlah Penyimpangan Intern *(Internal Fraud)*.
l. Permasalahan hukum yang dihadapi.
m. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
n. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain.

2. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 periode semester 1 dan semester 2.

C. TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA

a. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl. Transyogi RT.001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi 17435
Nomor Telepon	: (021) 2281 7575
Penjelasan Umum	: Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independent dan Fairness.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola	: Nilai 2 (dua)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola	: Manajemen BPR Depo Mitra Mandiri telah melakukan penerapan tata kelola dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen BPR.

b. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola yaitu :

i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK*)	: 3276066410770005
	Nama	: Teti Ofianti
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur Utama bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. Penghimpunan Dana; c. Penyaluran Dana; d. Edukasi, Literasi dan Inklusi; e. Pengembangan Bisnis.	
2.	NIK*)	: 3201135409910001
	Nama	: Meulya Putri

	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Fungsi Kepatuhan; b. Fungsi Manajemen Risiko; c. Fungsi APU dan PPT; d. Teknologi Informasi; e. Sumber Daya Manusia dan Umum; f. Penunjang Operasional.	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**): 1. Melakukan progres action plan penggabungan dengan BPR Dana Mitra Sakti. 2. Melakukan rekrutmen JAO dan AO dimana tahun 2024 bertambah JAO 2 orang dan AO sebanyak 1 orang.		

ii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK*)	: 3173052712720009
	Nama	: Fasika Khaerul Zaman
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris Utama bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. Penghimpunan Dana; c. Penyaluran Dana; d. Edukasi, Literasi dan Inklusi; e. Pengembangan Bisnis.	
2.	NIK*)	: 3173020106630005
	Nama	: Irianto

	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Fungsi Kepatuhan; b. Fungsi Manajemen Risiko; c. Fungsi APU dan PPT; d. Teknologi Informasi; e. Sumber Daya Manusia dan Umum; f. Penunjang Operasional.
Rekomendasi kepada Direksi: 1. Rencana Penggabungan dengan BPR Dana Mitra Sakti agar dilakukan monitoring *action plan*. 2. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, agar dilaksanakan sehingga pertumbuhan dan perkembangan organisasi kedepannya berkembang lebih baik.	

iii. Tidak terdapat Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

c. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :

i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	287,000,000	5	258,000,000	5
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

d. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :

i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :

i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

f. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :

i. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

g. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS yaitu :

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	614,400,000	2	241,920,000
2	Tunjangan	2	238,965,226	2	15,152,851
3	Tantiem	2	169,750,000	2	74,000,000
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5	Remunerasi lainnya	2	153,600,000	2	60,480,000
Total Remunerasi			1,176,715,226		391,552,851
No	Jenis Fasilitas Lain				
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	2	277,300,000	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			277,300,000		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1,454,015,226		391,552,851

h. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah yaitu :

No	Keterangan	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2.24 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.77 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.36 : 1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	3.80 : 1
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	4.41 : 1

i. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun yaitu :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-Jan-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - *Brand Name* Bank DMM di Cabang - Kerjasama Ruang Kerja - DPLK

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
2	14-Mar-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Kerjasama Ruang Kerja - Purna Jabatan Pengurus - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Perizinan *Safe Deposit Box* - Kerusakan Gedung Kantor Pusat - Website DMM - Laporan Tahunan
3	17-Apr-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Perizinan *Safe Deposit Box* - Kerusakan Gedung Kantor Pusat - Website DMM - Laporan Tahunan
4	15-May-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Perizinan *Safe Deposit Box* - Kerusakan Gedung Kantor Pusat - Purna Jabatan Pengurus - Jajaki Kredit Pensiun
5	13-Jun-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Perizinan *Safe Deposit Box* - Jajaki Kredit Pensiun
6	10-Jul-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Produk *Safe Deposit Box*

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
7	8-Aug-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - Rencana Tindak - Lain-Lain
8	6-Sep-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - Penggabungan BPR - Pengembangan aplikasi *corebanking* - Undangan debitur PASI - Renovasi Gedung Kantor Pusat
9	15-Oct-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - Penggabungan BPR - Laporan Literasi dan Inklusi - Pengembangan aplikasi *Corebanking* - Renovasi Gedung Kantor Pusat - Ruang Kerja
10	7-Nov-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Penggabungan BPR - Laporan Literasi dan Inklusi - Pengembangan aplikasi *Corebanking* - Pengurusan Direksi dan Dewan Komisaris
11	9-Dec-24	2	- Pembahasan Rencana Bisnis 2025 - Resume Laporan Keuangan - Rasio Proyeksi - Rekrutmen dan Inventaris 2025 - Strategi Bisnis dan Kebijakan - Lain-Lain
12	9-Dec-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Penggabungan BPR - Laporan Literasi dan Inklusi - Lain-Lain

j. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris yaitu :

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	12	0	100%
2	3173020106630005	Irianto	12	0	100%

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah Fasika Khaerul Zaman dan Irianto dengan frekuensi kehadiran fisik 12 kali.

k. Jumlah penyimpangan intern *(internal fraud)* yaitu :

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Selama tahun 2024 PT. BPR Depo Mitra Mandiri tidak terdapat penyimpangan internal dengan laporan sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumny	Tahun Laporan	Tahun Sebelumny	Tahun Laporan	Tahun Sebelumny	Tahun Laporan	Tahun Sebelumny	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

l. Permasalahan hukum yang dihadapi yaitu :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Terdapat gugatan terkait dengan 1 (satu) Kredit debitur dimana BPR menjadi turut tergugat dan 1 (satu) Kredit debitur dimana debitur sedang masuk dalam PKPU yang saat ini sedang proses penyelesaian.

m. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Depo Mitra Mandiri tidak ada, adapun laporannya sebagai berikut :

No	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kepentingan politik selama periode tahun 2024 tidak ada , Adapun laporannya sebagai berikut :

No	Tanggal Pelasanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-	-

D. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2024.

Pada tahun 2024, PT. BPR Depo Mitra Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek Kualitatif dan
2. Aspek Kuantitatif

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat penerapan Tata Kelola diterapkan pada 12 (dua belas) Faktor Penilaian, namun dikarenakan PT. BPR Depo Mitra Mandiri memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- maka untuk faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan fungsi komite tidak dinilai, maka faktor yang dinilai hanya sebanyak 11 (sebelas) faktor yaitu:

1. Aspek pemegang saham;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;

6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit BPR;
10. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
11. Rencana bisnis BPR.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada Tahun 2024 semester 2 dengan total penilaian tata kelola 2 dan dikategorikan ke dalam **"Peringkat 2 (dua)".**

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Depo Mitra Mandiri Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2024

Nilai Komposit	Predikat Komposit
2	Peringkat 2 (dua)

Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek Kualitatif dan Kuantitatif pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sudah baik sesuai penilaian dari hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola.
2. Tidak ada Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Posisi Laporan tahun 2024.

Bekasi, 04 Februari 2025

Dibuat oleh,

Teti Ofianti
Direktur Utama

Disetujui oleh,

Fasika Khaerul Zaman
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Depo Mitra Mandiri
Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Predikat Komposit	Peringkat 2 (dua)												

KESIMPULAN AKHIR
Manajemen BPR Depo Mitra Mandiri telah melakukan penerapan tata kelola dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen BPR.
FAKTOR POSITIF
1. Pemegang Saham berkomitmen untuk memperkuat permodalan BPR 2. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala 3. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain 4. Struktur organisasi telah lengkap sehingga mendukung pelaksanaan tata kelola dengan baik
FAKTOR NEGATIF
Belum dilakukan penyempurnaan pedoman strategi anti *fraud* dan kebijakan strategis terhadap renumerasi

Bekasi, 21 Januari 2025
Disetujui oleh :

Teti Ofianti	Fasika Khaerul Zaman
Direktur Utama	Komisaris Utama